

PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Viola Florenita

NPP. 30.0218

Asdaf Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: vflorenita@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Based on the topography of the area, the city of Padang is flowed by approximately 21 rivers which are divided into 6 large rivers. The rivers that are scattered in the city of Padang have a height that is not much different from sea level. Well this is the basic factor of flooding. In addition, the factors that cause flooding are relatively high rainfall, unfavorable urban planning, destruction of forests, littering, and poor drainage. The 3 core problems during the implementation of Flood Disaster Mitigation in Padang City are limited facilities and infrastructure, lack of human resources and low public awareness and lack of budget. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the Implementation of Flood Disaster Mitigation in the City of Padang by analyzing the inhibiting factors of flood disaster mitigation and to find out what efforts have been made by the Regional Disaster Management Agency for the City of Padang to overcome these obstacles. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative method with an inductive approach. In collecting data, researchers used interview techniques, observation and documentation. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The theory used in this thesis is the implementation theory put forward by George R. Terry (Sukarna, 2011). In this theory, implementation is measured through 6 (six) dimensions, namely leadership, attitude and morale, communication, encouragement, supervision and discipline. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of flood disaster mitigation in the city of Padang has been optimal. However, due to obstacles that can be seen from inadequate infrastructure, lack of budget, inadequate staff capacity and low public awareness of the risks of disaster impacts. Efforts made to deal with these obstacles are cooperation between government agencies or vertical agencies, increasing the capacity of employees by routinely conducting training and conducting socialization and inviting all regional heads whose areas are prone to flood disasters to play an active role. **Conclusion:** It can be concluded that theoretically the implementation of flood disaster mitigation in Padang City, West Sumatra Province is appropriate. However, there are important things that must be implemented for the implementation of disaster mitigation for the common good. This, of course, requires attention and setting priorities for the Padang City government so that the obstacles that occur in the implementation of disaster mitigation can be carried out effectively and efficiently.

Keywords: Implementation, Disaster Mitigation, Flood

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan topografi wilayah, Kota Padang dialiri kurang lebih 21 aliran sungai yang terbagi atas 6 aliran sungai besar. Sungai yang tersebar di wilayah Kota Padang memiliki ketinggian yang tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan air laut. Sehingga hal inilah yang menjadi faktor dasar terjadinya banjir. Selain itu faktor penyebab terjadinya banjir yaitu memiliki curah hujan yang relative tinggi, tata kota yang kurang kondusif, pengrusakan hutan, buang sampah sembarang, serta drainase yang kurang baik. 3 inti permasalahan saat pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kota Padang yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM dan rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya anggaran. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Padang dengan menganalisis faktor penghambat mitigasi bencana banjir serta mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry (Sukarna, 2011). Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 6 (enam) dimensi yaitu kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervise serta disiplin. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Padang sudah optimal. Namun, karena adanya hambatan yang dapat dilihat dari belum memadainya sarana prasarana, kurangnya anggaran, kapasitas pegawai yang masih kurang dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap resiko dampak bencana. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan ini adalah kerjasama antar lembaga pemerintah ataupun instansi vertikal, meningkatkan kapasitas pegawai dengan rutin melaksanakan pelatihan dan melakukan sosialisasi dan mengajak berperan aktif kepada seluruh kepala wilayah yang daerahnya rawan terkena bencana banjir. **Kesimpulan:** Dapat diperoleh simpulan bahwa secara teoretis pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah sesuai. Namun demikian, terdapat hal penting yang harus diterapkan untuk pelaksanaan mitigasi bencana ini demi kebaikan bersama. Hal ini, tentunya, perlu perhatian dan penetapan prioritas pemerintah Kota Padang agar hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Mitigasi Bencana, Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam riwayat geologi Nusantara fakta menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara Kepulauan. Indonesia merupakan salah satu kepulauan yang berada di dalam posisi kawasan cincin api (ring of fire), dimana ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sangat berisiko tinggi terkena bencana. Indonesia secara geografis juga terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografis inilah Indonesia menjadi negara yang paling rentan terkena bencana.

Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia dalam mengatasi bencana juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Terdapat 2 kebijakan pokok yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yakni (1) mengatur penanganan masalah bencana dimulai dari pencegahan, kepengurusan, hingga penanggulangan; dan (2) mengatur pengelolaan sebelum terjadinya bencana (before the disaster) segera setelah terjadinya bencana (emergency aid) dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (after the disaster). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam menangani penanggulangan bencana, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga non-kementerian. Dalam menjalankan tugasnya BNPB dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penyusunan prosedur dan penetapan kebijakan terkait penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien di daerah. Seperti halnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang yang memiliki tugas dan fungsi membantu upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengurangi resiko bencana (Mitigasi Bencana). Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan topografi wilayah, Kota Padang sendiri dialiri kurang lebih 21 aliran sungai yang terbagi atas 6 aliran sungai besar yaitu: Sungai Air Dingin, Sungai Batang Arau, Sungai Pisang, Sungai Air Timbalun, Sungai Batang Kandis dan Sungai Batang Kuranji. Sungai yang tersebar diwilayah Kota Padang memiliki ketinggian yang tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan laut. Hal inilah yang menjadi faktor dasar dari banyaknya wilayah Kota Padang yang rawan akan terjadinya bencana banjir.

Faktor penyebab terjadinya bencana banjir di Kota Padang sangatlah beragam, mulai dari faktor alam maupun faktor non-alam. Seperti yang kita ketahui bersama, Kota Padang memiliki curah hujan yang relatif tinggi hal inilah yang menjadi salah satu faktor alam penyebab terjadinya bencana banjir. Sementara itu, faktor non-alamnya sendiri dapat dilihat dari jumlah penduduk dan persebaran kegiatan penduduknya. Padatnya penduduk Kota Padang menyebabkan suatu wilayah menumpuk dan persebarannya tidak merata, tata kota yang kurang kondusif juga memperparah kondisi Kota Padang sehingga menjadi daerah rawan terjadinya banjir, pengrusakan hutan, membuang sampah sembarang tempat dan drainase yang kurang baik merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya banjir.

Mengacu pada data kejadian bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tahun 2021, menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan khususnya dalam mengurangi risiko bencana banjir. Tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tidak tinggal diam. Berbagai macam upaya yang telah dilakukan dalam Untuk mengatasi permasalahan akibat dari faktor terjadinya banjir, diperlukannya upaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Program itu sendiri ada yang bersifat fisik dan bersifat non fisik. Program bersifat fisik

itu sendiri biasanya berbentuk seperti fasilitas, alat, materil dan lainnya. Sedangkan program bersifat non fisik dapat berupa arahan, dukungan, regulasi dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, pemerintah daerah meluncurkan program pencegahan banjir yang diterapkan melalui organisasi perangkat daerah yang terkait dalam urusan pencegahan permasalahan banjir di daerah.

Walikota Kota Padang, Mahyeldi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian banjir di Kota Padang yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu, dengan meliputi empat kegiatan teknis. Kegiatan pertama, dengan melakukan pembangunan drainase lebih kurang 6 km di tahun 2018 dan 2019. Sementara pada tahun 2020 dilakukan pembangunan sepanjang 3 km. Teknis kedua, dilakukannya kegiatan merehabilitasi drainase dimana pada tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan rehabilitasi sepanjang 10 km serta tahun 2020 sepanjang 7 km. Upaya ketiga yaitu melakukan pengerukan sedimen drainase. Pada tahun 2018 sepanjang 34 km saluran, 48 km (2019) dan per bulan juli 2020 dilakukan sejauh 36 km dengan target penanganan pengerukan sedimen di 2020 ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Lorencia P. Barus berjudul *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan* (2013), menemukan bahwa BPBD Kota Medan belum maksimal menjalankan perannya dikarenakan BPBD baru terbentuk selama 1 tahun dan masih terdapat hambatan yang dihadapi seperti kurangnya koordinasi, sarana prasarana dan SDM yang belum memadai. Penelitian Ningrum dan Ginting (2020) berjudul *Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa* menemukan bahwa Identifikasi risiko bencana banjir dan pembuatan mitigasi structural pembangunan tanggul, drainase, dan mitigasi non-struktural pembangunan paradigma masyarakat tangguh bencana. Penelitian Paramitha, Utomo dan Miladan (2020) berjudul *Efektivitas Infrastruktur Perkotaan dalam Penanganan Risiko Banjir di Kota Surakarta* menemukan Risiko bencana banjir ditekan angkanya dengan mewujudkan infrastruktur kota yang efektivitasnya tinggi sehingga bisa menekan faktor risiko bencana kebanjiran dengan membuat saluran drainase yang bersifat efektif dan efisien dalam pembangunan-nya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan penulis fokus ke pelaksanaan mitigasinya sedangkan penelitian ini fokus ke penanggulangan secara keseluruhan dan lokasi penelitian juga menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Lalu Perbedaannya terletak pada perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak di fokus penelitian, penelitian penulis pada saat ini memfokuskan terhadap pengurangan risiko bencana.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Padang dengan menganalisis faktor penghambat mitigasi bencana banjir serta mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Sugiyono (2014:9) menyatakan metode penelitian kualitatif yaitu “metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan sebagai acuan dalam meneliti pada konsep obyek alamiah, dimana penulis berperan sebagai Instrument Kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Pada penelitian kualitatif maka data yang harus diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Untuk mendapatkan data yang tervalid dan actual tersebut maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut pendapat Creswell (2014:267-270) yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry (Sukarna, 2011). Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 6 (enam) dimensi yaitu kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervise serta disiplin. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Kepemimpinan

Pelaksanaan mitigasi bencana banjir ini diikuti dengan antusias masyarakat terutama bagi orang tua. Tak jarang, salah satu masyarakat yang belum mengetahui apa saja yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir langsung menanyakan kepada pegawai dan direspon baik dengan diberikan penjelasan. Selanjutnya, pendekatan yang terlihat adalah bagaimana pegawai berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana terutama bencana banjir agar pada saat terjadi bencana tidak menyebabkan kerugian yang besar dengan kata lain risiko bencananya berkurang dan tidak serta-merta membuat masyarakat bingung pada saat terjadinya bencana.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pelaksanaan Mitigasi Bencana dalam mengurangi risiko bencana banjir sudah sangat baik sesuai makna dari arti kepemimpinan yang dapat menggerakkan dan mengarahkan bawahannya dalam mencapai tujuan.

3.2. Sikap dan Moril

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis saat berada di sekitar Kecamatan Koto Tangah pada tanggal 17 Januari 2023 terdapat beberapa orang tua ibu/bapak yang belum sangat memahami apa itu mitigasi bencana dan apa gunanya mitigasi bencana itu sendiri. Namun, mereka mengacungkan jempol untuk pelayanan yang diberikan oleh para pegawai jika mereka melakukan pengaduan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Pelayanan itu berupa jika jarak rumah dengan kantor desa/kelurahan jauh, pegawai memberikan pemahaman dan keringanan bagi masyarakat agar pengaduan mengenai hal-hal yang dibutuhkan guna mengurangi risiko bencana terutama bencana banjir dapat menelfon agar nantinya disampaikan kepada kepala desa/lurah agar segera ditangani. Dari hasil observasi ini juga menunjukkan bahwa pegawai memiliki moril yang tinggi dan keberanian untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi saat pelaksanaan mitigasi bencana banjir di masyarakat.

3.3. Komunikasi

Komunikasi itu sendiri merupakan hal penting dalam melakukan pelayanan, seperti yang kita ketahui sendiri pelayanan itu adalah bentuk jasa yang dilakukan guna memudahkan urusan oleh penerima jasa pelayanan. Ada banyak bentuk jasa pelayanan, jenis pelayanan yang tercantum ada pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Padang Tahun 2020 – 2024 terkait mitigasi bencana banjir adalah pelayanan informasi dan pelayanan pencegahan. Pada kegiatan mitigasi bencana tentunya pelayanan juga sebagian dari rangkaian upaya agar proses mitigasi bencana terlaksana dengan baik. Pelayanan informasi merupakan upaya percepatan penyebaran informasi. Pelayanan informasi penting adanya demi pemberian kemudahan bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk dimanfaatkan pada upaya mitigasi bencana banjir. Dalam melaksanakan pelayanan informasi yang dilaksanakan BPBD pada mitigasi banjir bertujuan agar masyarakat dan pihak terkait dapat memperoleh informasi dari penyediaan informasi yang diberikan BPBD. Pelaksanaan pelayanan informasi bagi masyarakat diharapkan dapat bertindak secara mandiri dalam mitigasi banjir sehingga tercapainya efisiensi waktu, tenaga dan materi. Upaya yang sudah dilakukan BPBD dalam peran BPBD terkait pelayanan informasi bagi masyarakat dalam pencegahan banjir. Pada pelayanan informasi BPBD memiliki beberapa media yang dapat diakses semua pihak termasuk masyarakat, salah satunya yaitu portal web BPBD. Dapat disimpulkan bahwa BPBD telah melaksanakan pelayanan komunikasi informasi baik secara langsung ataupun dengan penyediaan pelayanan informasi melalui media elektronik dan call centre hanya saja mungkin ada beberapa informasi yang diperlukan tetapi bukan merupakan informasi yang dimiliki sepenuhnya oleh BPBD sendiri melainkan ada otoritas lain yang memiliki data yang dibutuhkan tersebut.

Selain itu, BPBD juga memiliki pelayanan pencegahan dalam hal pelayanan pengurangan pengurangan risiko bencana. Pelayanan yang dimaksud pada penelitian ini yakni mencakup layanan untuk pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan penduduk dalam menghadapi bencana melalui penyediaan Sarpras pengurangan resiko Bencana dan program-program pendukung lainnya. Layanan ini lebih memfokuskan ke ancaman dan keterpaparan sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan pengertian kesiapsiagaan sesuai Pasal 45 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sarana dan prasarana (Sarpras) serta risiko bencana yang menjadi fokus pada pelayanan pencegahan didasarkan atas informasi yang diperoleh baik oleh BPBD sendiri ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat dan pihak terkait.

3.4. Pendorong

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, kondisi sarana prasarana yang ada masih kurang memadai jika dilihat dari jumlahnya. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir BPBD tidak mengadakan sarana secara khusus karena bencana banjir dalam mitigasi melibatkan tugas dari beberapa OPD terkait terutama DLH dan PUPR seperti penanganan terkait sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan penanganan terkait permasalahan fasilitas dan infrastruktur aliran air oleh Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat (PUPR). dalam pengadaan sarana terkait pencegahan bencana banjir tidak sepenuhnya dilaksanakan BPBD Kota Padang karena dalam kegiatan pencegahan bencana banjir, sarana penunjang yang disiapkan biasanya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ataupun Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat (PUPR). Sebagai contoh dalam penyediaan biopori sebagai salah satu cara untuk mengatasi banjir disediakan oleh DLH bukan dari BPBD. Dengan begitu, terkhusus mengenai penyediaan sarana pada program mitigasi banjir BPBD sepenuhnya melaksanakan namun ada keterlibatan instansi terkait lainnya.

3.5. Supervisi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BPBD Kota Padang yaitu melalui wawancara yang mana mengatakan bahwa standar operasional prosedur di BPBD itu sendiri terbagi dalam 3 bidang yang mana tupoksi yang ada di letakkan pada masing-masing bidang tersebut agar memiliki Standar Operasional Prosedur atau disebut dengan SOP yang jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini diperoleh juga informasi terkait pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana memiliki prosedur operasi standar yang terdapat pada lampiran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kemudian POS tersebut dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah terdampak bencana. SOP tersebut sesuai dengan tujuan mitigasi bencana yakni kesiapan masyarakat dalam tanggap darurat bencana. Metode dalam pelaksanaan kebijakan dalam hal kebencanaan harus sesuai rasio serta bagaimana bertindak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hasil observasi yang juga telah dilakukan penulis saat terlibat langsung menjadi peserta apel dan mengamati pelaksanaan apel pagi di kantor dimana setiap pembina apel baik dari kepala dinas maupun pejabat lain selalu mengingatkan para anggota untuk bekerja dengan baik dan mencapai target sasaran pelayanan jemput bola itu sendiri.

3.6. Disiplin

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kedisiplinan sudah memenuhi yang juga telah sesuai berdasarkan observasi yang penulis lakukan dimana pegawai selalu mengikuti apel, mengisi absensi, melakukan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksi dan rela bekerja setelah jam kerja selesai yakni diatas jam 5 sore.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan mitigasi bencana yang ada di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dikarenakan sudah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun adanya beberapa hambatan dikarenakan kurangnya fasilitas dan dukungan dari baik pemerintah maupun masyarakat yang terkadang masih kurangnya edukasi terhadap mitigasi bencana. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini secara umum ialah terletak dalam pendanaannya yang masih kurang. Selain itu, masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada dan memadai di Kota Padang sehingga menjadi catatan penting bagi BPBD Kota Padang dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor hambatan pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ialah dengan membangun hubungan baik untuk bekerjasama dengan lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dan meningkatkan kapasitas personil melalui berbagai bentuk pelatihan tanggap bencana.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yaitu masih kurangnya edukasi baik terhadap pemerintah maupun masyarakat dikarenakan sosialisasi yang kurang. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada sehingga sedikit menghambat pelaksanaan mitigasi bencana. faktor yang cukup mempengaruhi terhadap efektivitas kerja ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Analisis wawancara, data, dan observasi yang didapat oleh penulis menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi pelaksanaan mitigasi bencana banjir yaitu kurangnya

tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi tentang bencana banjir, anggaran yang masih belum memadai dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan kurang efektif dan cepatnya penanganan bencana banjir. dapat disimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang peduli dan partisipasinya terhadap mitigasi bencana banjir, padahal partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangatlah penting karena bencana bukan hanya urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan tetapi bencana adalah urusan bersama dan pihak-pihak terkait lainnya juga memberikan bantuan berupa personel dan sarana dan prasarana yang memang saat ini BPBD Kota Padang masih kekurangan sarana prasarana. Sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi terkait mitigasi bencana banjir.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa secara teoretis pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah sesuai. Namun demikian, terdapat hal penting yang harus diterapkan untuk pelaksanaan mitigasi bencana ini demi kebaikan bersama. Hal ini, tentunya, perlu perhatian dan penetapan prioritas pemerintah Kota Padang agar hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan mitigasi bencana yang ada di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dikarenakan sudah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun adanya beberapa hambatan dikarenakan kurangnya fasilitas dan dukungan dari baik pemerintah maupun masyarakat yang terkadang masih kurangnya edukasi terhadap mitigasi bencana. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini secara umum ialah terletak dalam pendanaannya yang masih kurang. Selain itu, masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada dan memadai di Kota Padang sehingga menjadi catatan penting bagi BPBD Kota Padang dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor hambatan pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ialah dengan membangun hubungan baik untuk bekerjasama dengan lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dan meningkatkan kapasitas personil melalui berbagai bentuk pelatihan tanggap bencana IT.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan mitigasi bencana banjir untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Barus, P. L. (2022). *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan*. http://eprints.ipdn.ac.id/8106/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/8106/1/REP_OSITORY_DAFFA_ALHAQQ_PRABUMULIH%281%29.pdf
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* 4th edition. California: SAGE Publications
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geosee/index>
- Pramitha, A. A. S., Utomo, R. P., & Miladan, N. (2020). Efektivitas infrastruktur perkotaan dalam penanganan risiko banjir di Kota Surakarta. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.20961/region.v15i1.23258>
- Sekar Ningrum, A., & Br Ginting, K. (2020). Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada. *Geography Science Education Journal(GEOSEE)*, 1, 6–13.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

